

IMPELEMENTASI SAK 45 – LAPORAN KEUANGAN NIRLABA PADA MASJID MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Riva Ubar Harahap

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rivaubar@umsu.ac.id

Januri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
januri@umsu.ac.id

Surya Sanjaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
suryasanjaya@umsu.ac.id

Abstract

This study deals to do a research in order to inform concerning the implementation of accounting for mosque in the Muhammadiyah mosques in Medan. Hereafter, it will compile the recommendation of key action / action to arrange mosques' financial statements in accordance with Standard Akuntansi Keuangan (SAK) No.45. According to SAK No.45, Financial statement for mosque consists of statement of financial position, , statement of activity, statement of cash flows, and notes to the financial statement. Mostly, The person in charge receives a mandate from people around the mosque, related to accountability concept. Accounting as a media of accountability is an integral part of mosque's financial reports, so that it needs to be presented by the mosque in accordance with SAK No.45. Based on the observation, mostly the Muhammadiyah mosques regularly use the approach of cash basis, and do not implement yet PSAK 45 due to the human resources are incapable to implement accrual basis.

Keywords : SAK 45, Financial Statements

Pendahuluan

Masjid merupakan tempat ibadah umat Muslim. Dalam pengelolaan masjid, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan dan administrasi. Pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah pengelolaannya. Kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, akan tetapi kalau pengelolaan keuangan masjid itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab, akan mengakibatkan keuangan masjid tidak jelas penggunaannya.

Pengurus masjid biasanya menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana. Laporan keuangan yang disusun biasanya hanya mencatat dengan jelas

dari mana dana masuk, dan penggunaan dana masjid. Laporan keuangan ini disusun oleh bendara masjid terkadang seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali dan disampaikan biasanya pada waktu jumat kepada para jamaah. Namun masih ada masjid yang tidak membuat laporan keuangan yang mengakibatkan para jamaah bertanya-tanya karena tidak tahu keadaan keuangan mesjid tersebut.

Adapun landasan hukum atas penyusunan laporan keuangan atas keterbukaan informasi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni setiap badan publik termasuk yayasan atau masjid wajib terbuka atau transparan terkait anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/daerah, sumbangan masyarakat atau bantuan asing. dan pasal 52 yaitu badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). dan sesuai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pasal 52 ayat (2) dan (3) menekankan suatu entitas yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik apabila (a) Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam satu 1 (tahun) buku. (b) Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Keterbukaan informasi atas pengeloaan sumber pendapatan dan pengeluaran dana sangat bagi entitas atau organisasi khususnya masjid sangatlah penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu beberapa undang-undang dan peraturan mengatur keterbukaan informasi tersebut seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jika suatu entitas atau organisasi tidak memberikan keterbukaan informasi maka memungkinkan terjadi permasalahan seperti kasus pengurus Masjid Al-Jihad Medan, dimana pengurus Masjid Al-Jihad Medan Baru menyepakati adanya keterbukaan informasi yang telah dimintakan oleh pemohon informasi, guna meningkatkan transparansi, laporan keuangan masjid akan diaudit oleh akuntan publik bersertifikat. Hal tersebut ditegaskan saat sidang mediasi antara Pengurus Yayasan Masjid Al-Jihad Medan Baru yang dikuasakan Radiansyah Dharmawan SH, Tommy Bellyn Wiryadi, SH dan Suherman Nasution dengan Jamaah Masjid Al-Jihad yang diwakilkan H Marwan Lubis, H.Mahmud Siregar, H. Sudirman Lubis, H. Hasanuddin Purba, dan Andrian yang dipimpin mediator H.M Syahyan, mediator dan co. mediator Ramdeswati Pohan, di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jumat (28/11) Jalan Bilal Nomor 105 Medan.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diketuai H.M Zaki Abdullah beserta anggota antara lain Mayjen Simanungkalit, Robinson Simbolon, HM Syahyan dan Rameswati Pohan, memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tersebut. Pada kesempatan itu, Zaki menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni setiap badan publik termasuk yayasan atau masjid wajib terbuka atau transparan terkait anggaran yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/daerah, sumbangan masyarakat atau bantuan asing.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberika sanksi hukum bagi badan publik yang tidak transparan atau tidak memberikan informasi yang dimintakan pemohon informasi. Hal ini sesuai pasal 52 UU KIP yaitu badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Kasus sengketa informasi tersebut bermula saat H. Mahmud Siregar dan sejumlah jamaah lain memohon informasi tentang keuangan Masjid Al-Jihad kepada pengurus, namun tidak mendapat tanggapan. Sebab itu, mereka menyengketa kasus ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara. Informasi yang dimohonkan itu antara lain laporan keuangan kas masjid, uang pembangunan masjid, laporan zakat infaq dan sedekah (ZIS), laporan tabungan Ramadan, laporan tabungan berbuka puasa, laporan sumbangan langsung berbuka puasa, laporan tabungan Salat Idul fitri dan Idul adha serta laporan setoran parkir Masjid Al-Jihad.

Oleh karena itu hal ini bisa dihindari dengan kesadaran yang tinggi untuk menghindari kesalah pahaman dan fitnah, jika pengurus mesjid mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK No. 45. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK No. 45 akan memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi pemakai informasi tersebut dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi serta pertanggungjawaban pengurus mesjid atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa masjid yang merupakan tempat ibadah ummat Islam, juga sangat perlu untuk menyusun laporan keuangan. Sehubungan dengan perkembangan masjid pada saat sekarang ini sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan kas menjadi lebih kompleks, sehingga pengurus dituntut tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas serta sisa saldo kas saja. Namun pengurus mesjid dituntut untuk dapat menyusun laporan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan khususnya SAK No. 45. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengangkat fenomena akuntansi masjid khususnya pada masjid Muhammadiyah yang ada dikota Medan menjadi suatu penelitian ilmiah.

Kajian Literatur

A. Pengertian Akuntansi

Niswonger (1999) akuntansi didefenisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, Akuntansi berfungsi sebagai pemberi informasi untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Setiap organisasi merasa perlu dan berkepentingan dalam mengetahui perkembangan operasionalnya dari waktu ke waktu yang berasal dari sumber yang relevan dengan tujuan tersebut. Akuntansi merupakan suatu aktivitas mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi serta mengikhtisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan.

Menurut Abubakar. A & Wibowo (2004) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu

entitas/perusahaan. Dengan pernyataan tersebut, maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama yaitu: (1) Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, (2) Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis, dan (3) Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal. Fungsi akuntansi yang paling utama adalah sebagai media informasi keuangan suatu organisasi karena dari laporan akuntansi akan dapat dilihat kualitas yang ada dalam suatu organisasi serta perubahan yang terjadi dalam organisasi. Akuntansi memberikan informasi data kuantitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai tata keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak yang akan membuat keputusan dalam aktivitas selanjutnya baik orang yang ada di dalam organisasi maupun yang ada di luar organisasi.

B. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam upaya untuk membuat keputusan yang rasional, pihak ekstern perusahaan maupun pihak intern perusahaan seharusnya menggunakan suatu alat yang mampu menganalisis keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan yang dijadikan sebagai dasar menganalisis keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dalam jangka waktu satu periode akuntansi.

Menurut Munawir (2002) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah :

1. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
2. Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak.
3. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu.
4. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

Bagi pihak internal informasi laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan internal perusahaan. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk informasi laporan keuangan perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan yang hubungan mereka dengan perusahaan.

Niswonger. dkk (1999) bahwa Laporan keuangan perusahaan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan utama, dan laporan keuangan lainnya adalah sebagai pelengkap dari laporan keuangan utama. Institut Akuntan Publik Indonesia (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

C. Penerapan Akuntansi Masjid Berdasarkan SAK No. 45

Dalam perkembangannya, mesjid diharuskan menyajikan laporan keuangan karena sumber-sumber penerimaan keuangan mesjid semakin bervariasi dan kompleks begitu juga dengan penggunaannya. Akuntansi sehubungan dengan laporan keuangan mesjid ini di atur dalam SAK No. 45 yaitu laporan keuangan organisasi nirlaba (organisasi yang tidak bertujuan mencari laba).

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi profit. Jika dilihat dari karakteristiknya organisasi nirlaba adalah (a) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas sumbangan tersebut, (b) tidak bertujuan memupuk laba, (c) tidak ada kepemilikan, sehingga tidak dapat dijual, dipindahtangankan, atau tidak memiliki komposisi saham.

Transaksi yang akan dicatat hanya kejadian-kejadian yang memberikan dampak ekonomi (keuangan) kepada organisasi nirlaba. Transaksi yang akan dicatat telah melalui proses verifikasi, proses validasi, revidu berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Transaksi yang telah diproses tersebut diotorisasi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba menurut SAK 45, sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih organisasi pada suatu periode tertentu dan menyajikan hubungan diantara unsur-unsur yang membentuknya. Informasi yang disajikan laporan posisi keuangan :

- a. Aktiva, disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan periode atau kecepatannya di konversi atau dicairkan menjadi uang kas
- b. Kewajiban, disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya atau saat kewajiban itu harus dipenuhi
- c. Aktiva Bersih, disajikan terpisah berdasarkan batasan yang melekat padanya, yang batasan tersebut disyaratkan oleh pemberi donasi untuk tujuan tertentu, adapun aktiva bersih digolongkan dalam (1) Aktiva bersih tidak terikat, dimana aktiva bersih yang tidak diberikan batasan oleh pemberi donasi, dimana pengurus organisasi bebas menggunakannya untuk mendukung operasional organisasi berdasarkan policy dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi (2) Aktiva bersih terikat temporer, batasan yang diberikan oleh pemberi donasi bila telah melewati jangka waktu tertentu atau waktu pembatasan telah lewat, selisih lebih atau sisanya dapat digunakan untuk tujuan lain yang masih berkaitan dengan tujuan semula (3) Aktiva bersih terikat permanen, batasan yang diberikan oleh pemberi donasi secara jelas disebutkan hanya untuk kegiatan tertentu saja.

2. Laporan Aktivitas.

Laporan aktivitas menyajikan perubahan aktiva bersih, baik terikat permanen, temporer atau tidak terikat, yang tercermin pada aktiva bersih dalam laporan aktivitas. Menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, dan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat temporer atau permanen, dan untuk aktiva bersih terikat yang pembatasannya berakhir, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten. Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain, disajikan sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi. Beban harus disajikan menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa dan aktivitas pendukung.

3. Laporan Arus Kas.

Tujuan utama laporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas terdiri dari :

- a. Aktivitas Operasi, kelompok ini berkaitan dengan penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional organisasi, seperti kas dari penyumbang, penerimaan lain-lain, pembayaran pengeluaran rutin, hutang lain-lain yang dilunasi.
- b. Aktivitas Investasi, merupakan semua transaksi yang terkait dengan investasi organisasi, biasanya untuk yang sifatnya jangka panjang, antara lain: pembelian (penjualan) aktiva tetap, pembelian investasi, penerimaan dari penjualan investasi, penerimaan ganti rugi asuransi kebakaran/kerugian.
- c. Aktivitas Pendanaan, merupakan semua transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan aktiva bersih atau perolehan hutang organisasi yang sifatnya jangka panjang. Perbedaan dengan organisasi profit hanya pada penambahan pada persyaratan pembatasan yang ditentukan pemberi donasi. adapun aktivitas pendanaan yaitu penerimaan dari kontribusi dibatasi, antara lain: investasi yang dibatasi untuk jangka panjang, investasi yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, investasi bangunan, investasi perjanjian tahunan. dan aktivitas pendanaan lain yaitu bunga dan deviden dibatasi untuk re-investasi, pembayaran kewajiban tahunan, pembayaran kewajiban jangka panjang.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang akun-akun yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan akan memberikan perincian dari jumlah total aktiva tetap yang disajikan dan memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada

pada saat ini dan selanjutnya dideskripsikan bagaimana laporan keuangan masjid Muhammadiyah di kota Medan sesuai SAK No 45.

Temuan Penelitian dan pembahasan

A. Temuan Penelitian

Hasil pengamatan awal dari profil objek penelitian yaitu "Etitas" atau "Masjid Muhammadiyah di kota Medan" kami menemukan bahwa struktur organisasi sangat sederhana dan terlihat pada sistem pembukuan akuntansinya hanya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran rutin. Ayub dalam Halim (2013) menyebutkan bahwa dalam konteks organisasi masjid, keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana masjid. Sumber pendanaan masjid sebahagian besar berasal dari sumbangan masyarakat berupa infak atau shodakoh baik melalui kotak amal yang telah disediakan oleh pengelola masjid ataupun penerimaan dana sumbangan secara langsung kepada pihak pengelola masjid. selain sumbangan masyarakat berupa infak atau shodakoh, sumber penerimaan masjid dapat berupa penerimaan hibah, pendapatan penyewaan aula. Dana yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional masjid sehari-hari dan program kegiatan yang dilakukan baik bersifat rutin ataupun tidak. Berikut Tabel 1 ilustrasi penerimaan dan pengeluaran masjid pada umumnya.

Tabel 1
Ilustrasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Masjid Muhammadiyah

Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
Saldo Awal Kas	100.000.000	-	100.000.000
Penerimaan Infak	5.000.000	-	105.000.000
Penerimaan Hibah	4.000.000	-	109.000.000
Pendapatan sewa aula	10.000.000	-	119.000.000
Pendapatan Lain-lain	500.000	-	119.500.000
Beban Listik	-	200.000	119.300.000
Beban Air	-	100.000	119.200.000
beban pemeliharaan aset	-	300.000	118.900.000
Pembelian Lemari Arsip @ 1 unit	-	1.000.000	117.900.000

Pembelian Bangku @ 2 unit	-	500.000	117.400.000
Pembelian ATK	-	300.000	117.100.000
Beban Honor Pegawai kebersihan Masjid	-	750.000	116.350.000
Beban honor Khatib	-	1.000.000	115.350.000
Pembelian 1 Unit Sepeda Motor	-	15.000.000	100.350.000
Biaya Konsumsi	-	200.000	100.150.000
Biaya Transportasi	-	300.000	99.850.000
Pinjaman dari Pengurus Masjid	50.000.000	-	100.350.000
Saldo Akhir			100.350.000

Dari ilustrasi tabel 1 tersebut terlihat bahwa masjid tersebut menggunakan basis akuntansi kas. Dimana bendahara mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar. Pencatatan keuangan khususnya penerimaan atau pendapatan diperlakukan secara umum tanpa pengklasifikasian berdasarkan pembatasan atau jenis pendapatan yang diterima. Dapat dikatakan bahwa Masjid Muhammadiyah belum menerapkan pemisahan atas penerimaan yang diterima dari pemberi sumber daya ke dalam pendapatan tidak terikat, temporer dan permanen seperti PSAK 45.

Terdapat beberapa kelemahan akuntansi berbasis kas jika digunakan sebagai dasar atau konsep penyusunan laporan keuangan. adapun kelemahan-kelemahan akuntansi basis kas, adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi basis kas hanya memusatkan pada aliran kas yang tujuannya hanya menentukan saldo akhir kas yang tersisa diakhir periode pencatatan, dengan mengabaikan sumber-sumber lainnya. Akuntansi basis kas tidak dapat menampilkan laporan yang menyeluruh (komprehensif) dan laporan yang disajikan hanya berkaitan dengan kas.
2. Informasi keberadaan (eksistensi) mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban tidak dapat disajikan.
3. Kinerja unit organisasi hanya berpatokan pada ukuran kas, sehingga kinerja unit organisasi dapat dimanipulasi, dengan meningkatkan pendapatan kas dan menurunkan (menunda pembayaran) belanja.
4. Mengabaikan informasi masa lalu (pembelian aset, penerimaan dimuka sebelum barang atau jasa diserahkan, dan pembayaran dimuka sebelum barang atau jasa diterima) dan informasi masa mendatang yaitu piutang dan hutang.

Oleh karena itu, karena terdapat kelemahan-kelemahan akuntansi basis kas, maka penelitian ini mencoba untuk memberikan rekomendasi untuk menerapkan atau mengimplementasikan basis akrual dengan pendekatan PSAK 45 untuk menyusun laporan keuangan Masjid Muhammadiyah di kota Medan.

B. Pembahasan

Berikut ini memberikan konsep bagaimana transaksi penerimaan dan pengeluaran kas (basis kas) dapat dihubungkan kepada basis akuntansi akrual, sehingga dapat diterapkan PSAK 45 "laporan keuangan nirlaba" pada penyusunan laporan keuangan Masjid Muhammadiyah di kota Medan.

1. Laporan Aktivitas

Dalam PSAK 45 disebutkan tujuan utama laporan akitivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih (*asset netto*), hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan yang berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dan beban-beban yang terjadi oada entitas. Pendapatan dan beban masing-masing dikelompokkan berdasarkan pembatasan dan jenis dana yang melekat. adapun ilustrasi laporan aktivitas pada Masjid Muhammadiyah di kota Medan, dapat diilustrasikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 2
Ilustrasi Laporan Aktivitas Masjid Muhammadiyah
Laporan Akitivitas
Per 31 Desember 20XX

Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat

Pendapatan dan Penghasilan :

- Penerimaan Infak	5.000.000
- Pendapatan Sewa Aula	10.000.000
- Penghasilan Lain-lain	500.000
Jumlah Pendapatan	<hr/> 15.500.000

Beban Oprasional	
- Beban Listrik	200.000
- Beban Air	100.000
- Beban Pemeliharaan	300.000
- Beban ATK	300.000
- Beban Honor Pegawai Masjid	750.000
- Beban Honor Khatib	1.000.000
- Beban Konsumsi	200.000
- Beban Transportasi	300.000
Jumlah Beban Operasional	3.150.000
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tidak Terikat	<u>12.350.000</u>

Perubahan Aset Terikat Temporer :

- Hibah	4.000.000
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Terikat Temporer	<u>16.350.000</u>

Perubahan Aset Terikat Permanen :

- Hibah	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Terikat Temporer	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	<u><u>16.350.000</u></u>

2. Laporan Perubahan Aset Bersih.

Dari hasil pengamatan, dimana pada saat ini Masjid Muhammadiyah di kota Medan selama ini tidak memiliki laporan perubahan aset bersih. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam menyusun laporan perubahan aset bersih, maka dapat di ilustrasikan tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 3
Ilustrasi Perubahan Aset Bersih Masjid Muhammadiyah
Laporan Perubahan Aset Bersih
Per 31 Desember 20XX

Aset Bersih Tidak Terikat :

- Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	15.500.000
- Beban Operasional	(3.150.000)
Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat	<hr/> 12.350.000

Aset Bersih Terikat Temporer :

- Pembagian Keuntungan	-
- Sumbangan	-
- Hibah	4.000.000
Aset Bersih Terikat Temporer	<hr/> 4.000.000

Aset Bersih Terikat Permanen :

- Modal	100.000.000
- Penghasilan dari Investasi Jangka Panjang	-
- Penghasilan Bersih dari Investasi Jangka Panjang yang telah Terealisasi dan Belum Terealisasi	-
Aset Bersih Terikat Permanen	<hr/> 100.000.000
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih/ Hasil Efisiensi	<hr/> 116.350.000
Aset Bersih Awal Periode	<hr/> -

Aset Bersih Akhir Periode	116.350.000
---------------------------	-------------

3. Neraca.

Secara umum tujuan laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca pada entitas nirlaba adalah untuk menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih suatu entitas nirlaba serta hubungannya terhadap unsur-unsur tersebut pada periode waktu tertentu. Aset yang dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. dan sisi pasiva dikelompokkan menjadi kewajiban dan aset bersih entitas. pada sisi aset bersih sesuai dengan PSAK 45 maka aset bersih dikelompokkan menjadi tiga yaitu aset bersih tidak terikat, aset bersih temporer dan aset bersih permanen. Adapun ilustrasi neraca yang direkomendasikan untuk diterapkan pada Masjid Muhammadiyah di kota Medan, dapat dilihat pada ilustrasi tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4
Ilustrasi Neraca Masjid Muhammadiyah
Neraca
Per 31 Desember 20XX

<u>ASET</u>		<u>KEWAJIBAN</u>	
Aset Lancar		Kewajiban Lancar	
- Kas	100.350.000	- Hutang	500.000
Jumlah Aset Lancar	<u>100.350.000</u>	Jumlah Kewajiban Lancar	<u>500.000</u>
Aset Tidak Lancar		<u>ASET BERSIH</u>	
- Kendaraan - Sepeda Motor	15.000.000	- Aset Bersih Tidak Terikat	12.350.000
- Inventaris - Lemari	1.000.000	- Aset Bersih Temporer	4.000.000
- Inventaris - Kursi	500.000	- Aset Bersih Permanen	100.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>16.500.000</u>	Jumlah Aset bersih	<u>116.350.000</u>
Jumlah Aset	<u>116.500.000</u>	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u>116.500.000</u>

4. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas harus menyajikan arus kas selama satu perodesasi yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. untuk memastikan kehandalan dari laporan arus kas, maka nilai saldo akhir kas dan setara kas laporan arus kas harus sama dengan di neraca. Adapun ilustrasi arus kas yang direkomendasikan untuk diterapkan pada Masjid Muhammadiyah di kota Medan, dapat dilihat pada ilustrasi tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 5
Ilustrasi Arus Kas Masjid Muhammadiyah
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 20XX

Alian Kas Aktivitas Operasi :	
Hasil Efisiensi/Kenaikan Aset Bersih	16.350.000
Penyesuaian untuk Rekonsiliasi Perubahan Dalam Aset Bersih	
Menjadi Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi :	
- Utang	400.000
Kas Bersih yang Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	400.000
Aliran Kas Aktivitas Investasi :	
- Penambahan Kendaraan - Sepeda Bermotor	(15.000.000)
- Penambahan Investaris – Lemari	(1.000.000)
- Penambahan Inventaris - Kursi	(500.000)
Kas Bersih yang Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(16.500.000)
Aliran Kas Aktivitas Pendanaan :	

Modal	10.000.000
Pembagian Keuntungan	-
Kas Bersih yang Diterima (digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan	<u>100.000.000</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersoh kas dan Setara Kas	<u>100.350.000</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	-
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>100.350.000</u>

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pengurus masjid muhammadiyah di kota Medan belum menerapkan PSAK 45, sejalan dengan hasil penelitian Bayu dan Hambali (2014) menunjukkan bahwa realitas sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelaporan keuangan tidak perlu dilaporkan, penelitian tersebut kemudian menemukan bahwasanya: 1) minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan keuangan 2) masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap organisasi masjid 3) sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam mengelola keuangan, dan 4) perlunya kajian-kajian secara menyeluruh. Dan hasil penelitian Ronald dan Imran (2014) menunjukkan bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Tetapi setelah melakukan rekonstruksi laporan keuangan sederhana lebih cocok untuk di terapkan atau di sesuaikan dengan SAK 109 di dibandingkan dengan SAK 45 karena akun-akun yang terdapat di laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun-akun SAK 109. Penyebab penghambat penerapan SAK 109 pada masjid-masjid di lumajang di karenakan sumber daya manusia di bidang akuntansi kurang memadai, sedangkan ta'mir masjid yang tidak memiliki basis akuntansi dan kesulitan dalam penggolongan akun-akun.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang diungkapkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masjid Muhammadiyah di kota Medan masih menggunakan pendekatan akuntansi berbasis kas.
2. Masjid Muhammadiyah di kota Medan belum menerapkan PSAK 45 karena sumberdaya manusia belum mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Daftar Pustaka

Arif, Abu Bakar, dan Wibowo. 2004. *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Edisi Ketiga. Indonesia: Cikal Sakti.

- Andikawati , Desy, dan Wahyu Agus Winarno. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al- Huda Lumajang)*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Bayu, Ronald S, dan Imran Rosman Hambali. 2014. *Studi ethnosains : Dilema Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Mesjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggran Hingga Laporan Keuangan Pemerimtah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Munawir S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat*. Yogyakarta : Leiberty.
- Niswonger, Warren. Reeve and Fees. 1999. *Accounting. Ed. 19*. South-Western: College Publishing.